

ABSTRAK

Kasus korupsi di Indonesia bukan lagi sebagai persoalan yang baru, kasus korupsi ini awal kali muncul sudah ada pada ribuan tahun yang lalu, baik di Negara maju maupun Negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Fenomena korupsi marak terjadi akhir-akhir ini di Indonesia dimana anggota partai politik yang duduk dalam lembaga legislatif, eksekutif maupun yang bekerja sebagai pengurus atau kader partai politik sekalipun banyak terjerat kasus serupa.

Sebagai sebuah organisasi yang mengoordinasikan para calon yang akan bersaing dalam pemilihan umum di suatu Negara, partai politik justru banyak menimbulkan heterogenitas citra baik maupun buruk di masyarakat. Bagaimana tidak, dewasa ini partai politik cenderung berhubungan erat dengan korupsi yang yang sejatinya merupakan penyakit bagi tatanan suatu Negara. Terlebih, pasca banyaknya anggota dari partai politik yang terjerat kasus korupsi, partai politik semakin kehilangan elektabilitas politiknya sebagai sebuah organisasi yang menjadi sarana warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menggambarkan elektabilitas PPP Sumedang pasca kasus Korupsi serta faktor apa saja yang mendorong elektabilitas PPP Sumedang tetap meningkat pasca kasus korupsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi serta pengembangan ilmu politik dalam bidang kajian partai politik. Terutama kajian partai politik yang bersih dan berhasil mendapat dukungan dari masyarakat luas. Penelitian ini mewawancarai dengan 7 orang informan di sekitar Kabupaten Sumedang.

Hasil dari penelitian yang berjudul Kasus Korupsi Ketua Umum PPP (Romahurmuzyi) terhadap Elektabilitas Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Sumedang pada Pemilu 2019 tidak berpengaruh terhadap elektabilitas PPP di Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Korupsi, Elektabilitas, Partai Politik.

ABSTRACT

The case of corruption in Indonesia is no longer a new problem, this corruption case first appeared thousands of years ago, both in developed and developing countries such as in Indonesia. The phenomenon of corruption is rife lately in Indonesia, where members of political parties who sit in the legislative, executive and work as administrators or cadres of political parties, even though many are entangled in similar cases.

As an organization that coordinates the candidates who will compete in general elections in a country, political parties actually cause a lot of heterogeneity of good and bad images in society. How not, nowadays political parties tend to be closely related to corruption which is actually a disease for the structure of a country. Moreover, after many members of political parties were entangled in corruption cases, political parties increasingly lost their political electability as an organization that became a means for citizens to participate in the state management process.

This research was conducted using a qualitative method with a descriptive approach. The purpose of this study is to find out and describe the electability of PPP Sumedang after the corruption case and what factors encourage the electability of the Sumedang PPP to continue to increase after the corruption case. In addition, this research is also expected to contribute and develop political science in the field of political party studies. Especially the study of political parties that are clean and have succeeded in getting support from the wider community. This study interviewed 7 informants around Sumedang Regency.

*The results of the study entitled *The Corruption Case of the PPP Chairman (Romahurmuziy) on the electability of the United Development Party in Sumedang Regency in the 2019 Election* did not affect PPP electability in Sumedang Regency.*

Keywords: Corruption, Electability, Political Parties.